

BUKU PEDOMAN **SABUN KENCANA**

SEKOLAH AMAN BENCANA UPAYA MEMBANGUN
KESIAPSIAGAAN BENCANA



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MAGELANG**

Jangan Panik ! Praktik Baik Pendidikan Kebencanaan

Diterbitkan oleh :

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

Sebagai Pedoman Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana
Kota Magelang

Pengantar

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tingkat risiko bencana tinggi di dunia. Dalam World Risk Index 2017, Indonesia menempati peringkat ke-33 dunia dibanding dengan negara lain (menggunakan data analisis laporan kebencanaan tahun 2012-2016). Selain itu, Indonesia terletak di tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Pasifik, Eurasia dan Indo-Australia yang saling menumbuk satu sama lain serta berada di cincin api pasifik dunia dengan 127 gunung api aktif. Mempertimbangkan hal ini, pendidikan kebencanaan menjadi salah satu prioritas penting penanggulangan bencana terutama dalam upaya mitigasi bencana. Pendidikan bencana di Indonesia merupakan salah satu dari prioritas arahan presiden untuk penanggulangan bencana di tahun 2019.

Melalui pendidikan kebencanaan diharapkan dapat mengubah kesadaran dan menguatkan karakter penerus bangsa yang tangguh terhadap bencana. Pengetahuan tentang kebencanaan sangat penting bagi anak-anak dan generasi muda. Mereka adalah bagian dari masa depan bangsa Indonesia. Selain itu, anak-anak dapat menularkan pendidikan kebencanaan dan dapat menjadi agen perubahan di keluarga. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen melaksanakan Sekolah Aman Bencana – *Safe School* sejak tahun 2010 dengan meluncurkan kampanye satu juta sekolah dan rumah sakit aman di Indonesia.

Komitmen ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala BNPB N0.4 Tahun 2012 tentang penerapan Sekolah/ Madrasah Aman Bencana (SMAB) yang menjadi landasan pelaksanaan penerapan pendidikan kebencanaan hingga saat ini.

Buku Pedoman Pendidikan Aman Bencana ini merupakan pedoman pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kota Magelang sebagai komitmen pemerintah guna mempercepat akselerasi pembangunan sekolah aman bencana sebagai salah satu pilar penting dalam proyek pendidikan sejak dini tentang kebencanaan guna meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana.

Kepala Pelaksana
BPBD Kota Magelang



MACHBUB YANI ARFIAN,SPd

Latar Belakang

Kota Magelang merupakan salah satu daerah dengan potensi berbagai jenis bencana. kejadian bencana di Kota Magelang memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah dalam upaya penanggulangannya. Beberapa tahun belakangan ini upaya penanggulangan bencana di Kota Magelang masih cenderung berfokus pada responsif, sehingga efektifitas upaya pengurangan risiko bencana belum dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Selain itu, kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Magelang memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah, dan terpadu.

Kota Magelang yang mengandung kekayaan alam dan keberagaman masyarakatnya dengan kondisi geografis dan topografi yang beragam, juga menyimpan banyak potensi ancaman bencana. Kondisi ini dilihat dari bencana-bencana yang sudah pernah terjadi, baik yang memiliki dampak besar maupun yang kecil. Adapun bencana yang pernah terjadi dan berpotensi terjadi di Kota Magelang berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang ada 7 (tujuh) potensi bencana, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ektrim (angin puting beliung), gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Dari 7 (tujuh) potensi bencana tersebut, semuanya pernah terjadi di Kota Magelang

dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Kejadian bencana alam tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang mengganggu aktivitas kehidupan penghidupan di Kota Magelang.

Selain kehilangan jiwa, juga banyak aset yang mengalami kerusakan akibat bencana, di antaranya gedung-gedung pelayanan publik yang pada akhirnya kerusakan ini akan mengganggu kehidupan keseharian. Di antara gedung pelayanan publik yang ada, bangunan pelayanan dasar seperti gedung sekolah dan gedung yang terkait dengan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, pustu, posyandu adalah fasilitas sosial yang di dalamnya terdapat kumpulan manusia yang perlu diprioritaskan.

Menjawab tantangan tersebut, tahun 2019 Kemendikbud telah mengeluarkan peraturan menteri nomor 33 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Tentunya peraturan tersebut dapat menjadi kekuatan baru bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah rawan bencana untuk segera melakukan kegiatan penerapan Program SPAB. Tantangan selanjutnya adalah satuan pendidikan dihadapkan dengan pentingnya edukasi tentang adaptasi perubahan iklim. Tentunya hal ini menjadi hal penting untuk dipahami bersama, supaya mulai sejak dini peserta didik mampu melakukan upaya dalam menghadapi dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Hal tersebut diperkuat dengan

Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim, dimana Indonesia telah berkomitmen dalam mendukung adaptasi perubahan iklim.

Tujuan

1. Membangun budaya siaga, budaya aman dan budaya pengurangan risiko bencana di sekolah, serta membangun ketahanan warga sekolah dalam menghadapi bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka memberikan perlindungan kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan dan masyarakat di sekitar sekolah dari ancaman dan dampak bencana;
2. Menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah;
3. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait tentang kondisi struktur bangunan dan aksesibilitas lingkungan satuan pendidikan sebagai upaya pengurangan risiko bencana yang menjangkau semua warga satuan pendidikan (inklusif);

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus;
9. Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan

Aman Bencana

10. Peraturan menteri negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 8 tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana;
12. Surat Edaran Mendikbud nomor 70a tahun 2010 tentang pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah.

Modul Satuan Pendidikan Aman Bencana

Modul 1

Ruang lingkup pedoman penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana ini diarahkan pada aspek mendasar, yaitu:

- (1) Kerangka Kerja Struktural, yang terdiri dari:
 - Lokasi aman
 - Struktur bangunan aman
 - Desain dan penataan kelas aman
 - Dukungan sarana dan prasara aman
- (2) Kerangka Kerja Non-Struktural, yang terdiri dari:
 - Peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan
 - Kebijakan sekolah/ madrasah aman
 - Perencanaan kesiapsiagaan
 - Mobilitas sumberdaya

Sasaran sekolah aman yang komprehensif

Sasaran dari sekolah aman yang komprehensif dalam menghadapi bahaya yang sudah diperkirakan, baik yang alami ataupun buatan manusia, adalah untuk:

- Melindungi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lainnya dari risiko kematian dan cedera di sekolah
- Merencanakan kesinambungan pendidikan

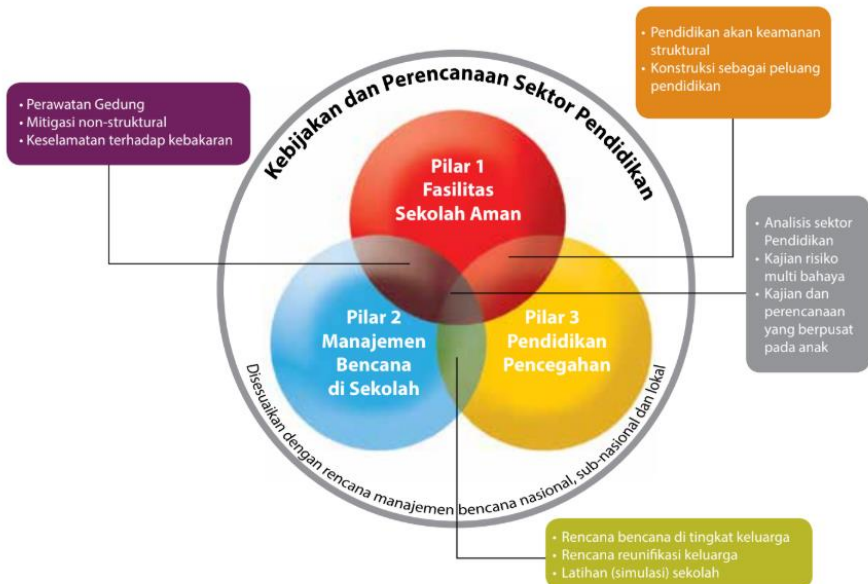
dalam menghadapi bahaya yang sudah diperkirakan

- Memperkuat ketangguhan warga komunitas terhadap bencana melalui pendidikan
- Melindungi investasi di sektor pendidikan

Tiga pilar sekolah aman yang komprehensif

Sekolah aman yang komprehensif dapat dicapai melalui kebijakan dan perencanaan yang sejalan dengan manajemen bencana Kota Magelang dan di tingkat sekolah. Sekolah aman yang komprehensif ini ditopang oleh tiga pilar sebagai berikut:

1. Fasilitas Sekolah Aman
2. Manajemen Bencana di Sekolah
3. Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana.



Fasilitas Sekolah Aman

Bangunan sekolah dan fasilitas sekolah yang tidak aman dari bencana akan sangat rentan dari segi keamanannya, bukan saja mengancam jiwa anak-anak, tetapi kerusakan maupun kehancuran sarana dan prasarana fisik ini merupakan kehilangan aset ekonomi bagi daerah dan komunitas pada khususnya dan biaya untuk membangun ulang akan membebani Anggaran

Fasilitas Sekolah Aman melibatkan pihak-pihak berwenang di sektor pendidikan, peserta didik(anak-anak), perencana, arsitek, insinyur, para tukang bangunan dan anggota komite sekolah dalam menentukan lokasi yang aman, perancangan, konstruksi dan perawatan (termasuk akses yang aman dan berkelanjutan untuk mencapai fasilitas tersebut).

Pengetahuan mengenai Fasilitas Sekolah Aman merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa sekolah yang berlokasi di daerah rawan bahaya sudah dirancang dan dibangun sedemikian rupasehingga penggunaanya (peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain) terlindungi. Pengetahuan ini juga dapat digunakan dalam melakukan penguatan (retrofit) terhadap bangunan sekolah, sehingga lingkungan belajar menjadi tempat berlindung yang aman, dan bukan merupakan tempat yang dapat membahayakan bagi kehidupan mereka. Pendekatan konstruksi dan penguatan (retrofit) terhadap sekolah aman yang melibatkan masyarakat luas dalam memadukan pengetahuan baru dan keterampilan pencegahan bencana dapat berdampak lebih luas daripada dampak terhadap sekolah itu sendiri. Pendekatan sekolah aman dapat menjadimodel konstruksi dan peningkatan

tingkat keamanan untuk pembangunan rumah, pusat kesehatan masyarakat, dan bangunan fasilitas umum lainnya.

Manajemen Bencana di Sekolah

Manajemen Bencana di Sekolah merupakan proses pengkajian yang kemudian diikuti oleh perencanaan terhadap perlindungan fisik, perencanaan pengembangan kapasitas dalam melakukan respon/tanggap darurat, dan perencanaan kesinambungan pendidikan, di tingkat sekolah masing-masing sampai dengan otoritas pendidikan di Tingkat Kota Magelang. Manajemen Bencana di Sekolah ditentukan melalui pihak-pihak berwenang di sektor pendidikan tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota dan di tingkat komunitas sekolah (termasuk peserta didik dan orang tua peserta didik), bekerja sama dengan mitra di bidang manajemen bencana, untuk menjaga lingkungan belajar yang aman serta merencanakan kesinambungan pendidikan pendidikan baik di masa tidak ada bencana maupun di saat terjadi bencana, sesuai dengan standar internasional.

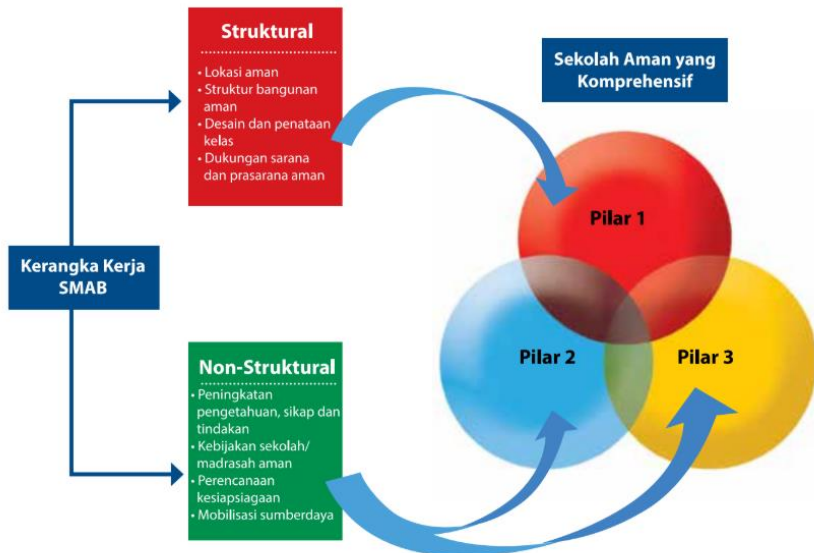
Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana

Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana atau lebih sering disebut sebagai Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan sebuah kegiatan jangka panjang dan merupakan bagiandari pembangunan berkelanjutan. Melalui pendidikan diharapkan agar upaya pengurangan risiko bencana dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat dikenalkan secara lebih dini kepada seluruh peserta

didik, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kesiapsiagaan individu maupun masyarakat terhadap bencana. Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana harus dirancang untuk membangun budaya aman dan komunitas yang tangguh.

Keterkaitan antara Kerangka Kerja Struktural dan Kerangka Kerja Non-Struktural yang tercantum di dalam Perka BNPB No. 4 Tahun 2012 mengenai SMAB dengan Kerangka Kerja global Sekolah Aman yang Komprehensif adalah sebagai berikut:

- Cakupan Kerangka Kerja Struktural tercantum di dalam Pilar 1 Kerangka Kerja Sekolah Aman yang Komprehensif
- Cakupan Kerangka Kerja Non-Struktural tercantum di dalam Pilar 2 dan Pilar 3 Kerangka Kerja Sekolah Aman yang Komprehensif.



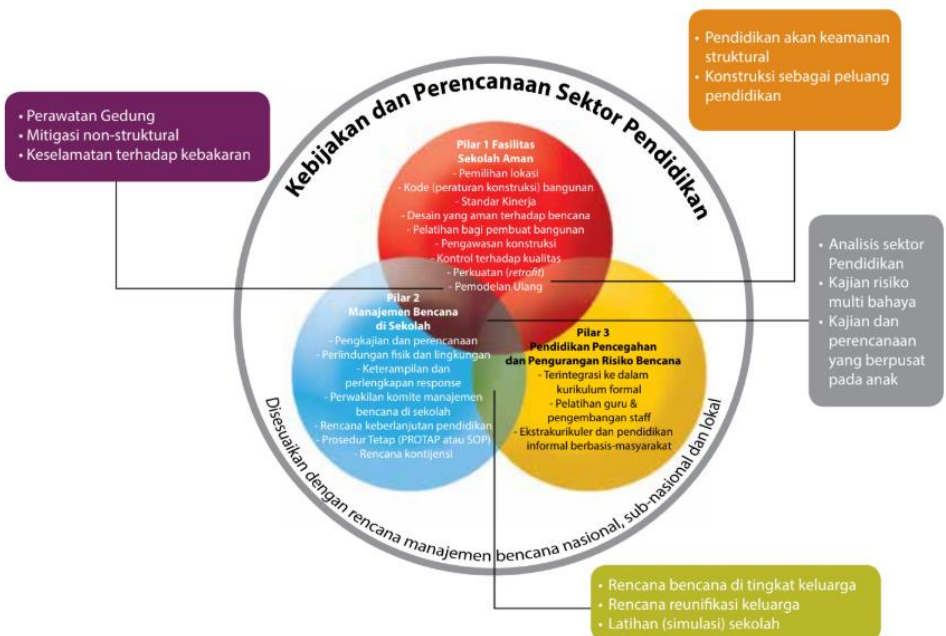
PILAR 1 – FASILITAS SEKOLAH AMAN

Fasilitas Sekolah Aman merupakan fasilitas sekolah dengan gedung, isinya dan halaman sekitarnya memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan termasuk kelayakan bagi anak berkebutuhan khusus, kenyamanan dan keamanan sesuai dengan Permen PU No 29/2006 dan Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Tahan Gempa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2006, SNI-1726-2002 dan Perka BNPB No. 4/2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Secara umum dalam rangka penerapan Sekolah Aman, sekolah diharapkan mampu melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Memilih lokasi sekolah yang aman dan melaksanakan perencanaan ketahanan terhadap bencana dan konstruksinya untuk menjadikan setiap sekolah baru menjadi sekolah yang aman.
- Melaksanakan skema prioritas dan retrofitting dan perubahan lokasi sekolah (termasuk merelokasi sekolah-sekolah yang kurang aman).
- Menimimalkan risiko struktural, non-struktural dan infrastruktur untuk membuat bangunan dan fasilitas untuk menyelamatkan diri dan evakuasi.
- Memasukan akses dan keamanan bagi para disabilitas dalam perencanaan dan konstruksi fasilitas sekolah.
- Jika sekolah direncanakan sebagai hunian sementara komunitas, maka perencanaannya diharapkan untuk memasukkan kebutuhan untuk kaum disabilitas, dan menjamin bahwa perencanaan juga memenuhi kebutuhan untuk fasilitas alternatif untuk kelangsungan pendidikan.
- Menjamin bahwa akses anak-anak ke sekolah aman dari risiko fisik (seperti jalur pejalan kaki, jalur penyeberangan jalan dan penyeberangan sungai).

- Memasukan fasilitas air dan sanitasi ke dalam potensi risiko (seperti fasilitas air tadah hujan dan fasilitas toilet/kamar kecil berjajar).
- Melaksanakan intervensi yang memperhatikan perubahan cuaca untuk ketahanan terhadap air, energi dan makanan (misalnya penampungan air hujan, panel surya, energi baru dan terbarukan, taman sekolah).
- Melakukan pemeliharaan fasilitas sekolah dan menjaga keamanan. Fasilitas sekolah aman menjadi kondisi yang dapat diandalkan dalam memberikan keamanan bagi warga sekolah saat terjadi bencana.

Konsep sekolah aman yang belakangan dikembangkan menjadi SekolahAman yang Komprehensif mencakup unsur-unsur sebagai sub-pilar yang menunjang fasilitas sekolah aman seperti tertera dalam diagram ini:



Sub Pilar Utama yang menumpang pilar 1 tersebut adalah sebagai berikut:]

PERSIAPAN	PEMBANGUNAN	PEMELIHARAAN
1. Pemilihan lokasi	2. Standar (peraturan konstruksi) bangunan (<i>building code</i>) 3. Standar kinerja 4. Desain yang aman terhadap bencana 5. Pelatihan bagi pembuat bangunan	6. Pengawasan konstruksi 7. Kontrol terhadap kualitas 8. Pemodelan ulang atau renovasi 9. Perkuatan (<i>retrofit</i>)

Selain itu, juga terdapat irisan antara Pilar 1 Fasilitas Sekolah Aman dengan Pilar 2 Manajemen Bencana di Sekolah yaitu:

1. Perawatan gedung
2. Mitigasi non-struktural
3. Keselamatan dari kebakaran

Sedangkan irisan antara Pilar 1 dan Pilar 3 Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana adalah:

1. Pendidikan struktur bangunan yang aman
2. Konstruksi sebagai peluang pembelajaran

Sedang irisan ketiga pilar tersebut adalah:

1. Analisis sektor pendidikan
2. Kajian risiko multi-bahaya
3. Kajian dan perencanaan yang berpusat pada anak

PILAR 2 – MANAJEMEN BENCANA DI SEKOLAH

Keamanan sekolah adalah tugas dan tanggung jawab seluruh komunitas sekolah. Upaya ini membutuhkan kepemimpinan dan koordinasi oleh pihak pengelola sekolah, dan memerlukan keterlibatan dan partisipasi dalam semua bidang oleh komunitas sekolah.

Setiap sekolah harus membuat “manajemen bencana di sekolah” yang merupakan bagian dari pekerjaan komite sekolah yang ada, atau membentuk sebuah ‘Komite Sekolah Penanggulangan Bencana’ atau sub-komite ‘Sekolah Aman’ untuk tujuan ini. Di tahun pertama biasanya akan diperlukan pertemuan setiap bulan, tetapi dengan seluruh partisipasi dari sekolah dan terintegrasi dengan pendidikan formal dan informal, maka di tahun berikutnya dapat diteruskan dengan tiga atau empat pertemuan per tahun. Komite ini memberikan kepemimpinan dalam mengembangkan, melakukan adaptasi, melaksanakan, dan memperbarui rencana penanggulangan bencana sekolah. Hal ini mendorong kesiapsiagaan pribadi dan organisasi, panduan kerja mitigasi, memastikan adanya dua latihan kebakaran dan evakuasi bangunan dalam setiap tahun, mengadakan pelatihan simulasi setiap tahunnya, melakukan evaluasi, dan memastikan semua sesuai dengan rencana. Idealnya Komite Sekolah diberdayakan dan mengelola keterkaitan antara pihak sekolah dan otoritas penanggulangan bencana (dalam hal ini: BPBD).

Sekolah harus menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta sumber daya finansial dalam pengelolaan untuk menjamin kesiapsiagaan bencana di sekolah. Mobilisasi sumber daya didasarkan pada kemampuan sekolah dan pemangku kepentingan sekolah. Mobilisasi ini juga terbuka bagi peluang partisipasi dari para pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi, pelaksanaan

program dan kebijakan sangat penting untuk keberhasilan kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

Adanya kebijakan, kesepakatan dan/atau peraturan sekolah yang mendukung upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah

Rencana Penanggulangan Bencana di Sekolah yang Partisipatif akan selalu dikembangkan dan diperbaharui setiap tahun, dan tidak akan pernah menjadi dokumen yang dianggap sudah selesai. Saat sedang dalam proses perencanaan, pastikan semua dokumen berada pada satu tempat di kantor yang dapat dilihat dan diakses oleh semua orang. Suksesnya sebuah perencanaan adalah pada proses perencanaannya, dan bukan dinilai dari sekedar setumpuk dokumen yang dijilid.

Oleh karena itu, Rencana Penanggulangan Bencana di Sekolah sangat penting untuk disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait, antara lain kepada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lain, peserta didik dan orang tua peserta didik ataupun walisiswa, penjaga sekolah, perwakilan masyarakat sekitar (RT/RW) dan pihak terkait lainnya. Apabila dokumen ini diperbaharui, maka upaya sosialisasi dokumen yang baru harus juga dilakukan.

Dalam perjalanan langkah-langkah berikutnya, akan dihasilkan dan kembali dihasilkan dokumentasi yang selalu berkembang yang akan membentuk dan menyempurnakan rencana penanggulangan bencana ini. Hal yang sangat penting adalah melibatkan setiap orang untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pembelajaran dan melanjutkan untuk mengembangkan perencanaan melalui praktek langsung.

Melakukan Kajian terhadap risiko, bahaya, kerentanan dan sumber daya

Risiko dikaji/ diidentifikasi dengan mempertimbangkan potensi bahaya (alam, buatan manusia, atau gabungan) dalam hubungannya dengan karakteristik kerentanan masyarakat. Kerentanan dapat bersifat fisik, sosial, ekonomi atau lingkungan. Sebagai contoh, anak-anak, dewasa, orang-orang penyandang disabilitas, orang-orang miskin, kelompok minoritas, pendatang baru, dan orang-orang yang buta huruf lebih rentan jika mereka tidak memiliki sistem pendukung. Bangunan yang dibangun tanpa memperhitungkan ketahanannya terhadap bahaya akan menjadi salah satu sumber kerentanan.

Langkah di bawah ini akan memberikan panduan dalam mendokumentasikan bahaya yang dihadapi, karakteristik kerentanan masyarakat dan kerentanan lokasi, serta risiko yang dihasilkan. Membuat Matriks Risiko akan membantu dalam melihat gambaran yang lebih besar, dan membantu dalam memfokuskan dan memprioritaskan upaya-upaya mengurangi kerentanan dan risiko. Dalam pembuatannya akan diperlukan penelitian dan diskusi.

Tahapan dalam melakukan kajian resiko bahaya adalah sebagai berikut:

- 1. Mengkaji Bahaya dan Risiko**
 - a. Mengidentifikasi semua bahaya yang dihadapi komunitas sekolah.**
 - b. Diskusikan kemungkinan terjadinya bahaya.**
 - c. Pertimbangkan tingkat keparahan untuk setiap bahaya dan pikirkan tentang berbagai kerugian yang mungkin dihadapi sekolah**

Menilai Keamanan Non-Struktural

Jika prioritas sudah ditekankan pada ancaman (misalnya: kebakaran, gempa bumi, banjir, atau angin kencang), maka langkah selanjutnya yang harus diambil adalah melakukan pengkajian terhadap risiko non-struktural terkait bangunan (sekolah). Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi hal-hal yang harus diambil untuk membuat ruang kelas, kantor, dan ruang umum menjadi lebih aman. Tim peninjau harus juga terdiri dari pengguna dari masing-masing ruangan serta tenaga kependidikan bagian pemeliharaan fasilitas. Gunakan imajinasi dan akal sehat saat meninjau dari satu ruang ke ruang lain, dan sekitar gedung. Ajak pula perwakilan peserta didik sebagai bagian dari tim peninjau karena anak-anak (terutama yang sudah dilatih) memiliki imajinasi dan akal yang lebih hebat dibandingkan dengan orang dewasa.

Tindakan pencegahan dan keselamatan terhadap kebakaran merupakan bagian dari desain awal sekolah, dan yang juga memerlukan pemeliharaan secara rutin dan pengujian. Lakukan kajian untuk memastikan:

- Sumber bahan yang mudah terbakar dan berbahaya jumlahnya terbatas, terisolasi, dihilangkan, atau diamankan. Termasuk jalur listrik dan peralatan listrik, pemanas dan kompor, pipa gas alam, tabung gas elpiji, cairan yang mudah terbakar. Termasuk juga pohon dan bahan mudah terbakar lainnya yang berada di dekat bangunan.
- Rute keluar gedung yang jelas untuk memfasilitasi evakuasi yang aman dalam kasus kebakaran atau keadaan darurat lainnya
- Alat pendeteksi dan sistem tanda bahaya bekerja dengan baik
- Alat pemadam kebakaran secara teratur diisi ulang

- Alat pemadam kebakaran lainnya dan peralatan kontrol diuji secara teratur dan dipelihara
- Peralatan mekanis (bila ada), listrik, struktur bangunan dan sistem yang dipelihara dan dioperasikan sesuai dengan kriteria keselamatan kebakaran.

Untuk keamanan terhadap angin kencang, pikirkan mengenai benda-benda yang mudah terkoyak, terbang atau rusak akibat angin di luar. Termasuk di antaranya adalah pohon-pohon yang tinggi, kabel listrik, tangki air, dan bangunan lainnya. Apa saja yang dapat jatuh ke bangunan atau melayang ke arah bangunan. Catat apa saja yang dapat dilakukan, siapa yang harus melakukan, dan kapan (pekerjaan tersebut) dapat diselesaikan.

Untuk keamanan terhadap gempa, periksa semua ruang di setiap bangunan selain juga daerah di luar bangunan. Pikirkan mengenai benda-benda yang mungkin dapat meluncur, jatuh, dan terbang, dan terutama apapun yang dapat mengakibatkan cedera atau memblokir jalan keluar. Catat apa saja yang dapat dilakukan, siapa yang harus melakukan, dan kapan (pekerjaan tersebut) dapat diselesaikan.

Untuk keamanan terhadap air pasang atau banjir maupun banjir bandang, periksa apakah ruang penyimpanan atau gudang berada di lantai dua, di atas lemari tinggi, atau di keranjang yang digantung di atas perkiraan tinggi air, atau apakah kotak penyimpanan tahan air tersedia untuk menyimpan peralatan sekolah dan persediaan jika terjadi hujan lebat?

Pengkajian Kapasitas dan Sumber Daya untuk Mitigasi, Respon dan Pemulihan

Komunitas sekolah memiliki banyak kekuatan, kapasitas dan sumber daya yang perlu untuk diidentifikasi dan dimobilisasi. Saat bekerja sama, pemahaman yang baik akan berkembang untuk beberapa tindakan perlindungan secara fisik, sebagaimana keterampilan merespon dan keterampilan melakukan pemulihan serta sumber daya yang akan dibutuhkan. Buat catatan dari semua kebutuhan ini. Kemudian, di dalam komunitas, identifikasi setiap orang dan tempat berikut pengetahuan, keterampilan, dan persediaan/ perlengkapan yang dibutuhkan, dan temukan bagaimana agar dapat mengaktivasi kapasitas tersebut untuk mengurangi risiko dan mempercepat pemulihan. Identifikasi sumber daya dan penyelesaian masalah untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Termasuk nama, keterampilan/sumber daya, lokasi, dan informasi kontak.

Menggunakan Peta Risiko Sederhana Tingkat Sekolah dan Sumberdaya Sekolah dan Lingkungan

Peta sekolah dan lingkungannya merupakan perangkat yang sangat diperlukan untuk mencatat dan menggambarkan risiko-risiko dan sumberdaya di dalam lingkungan sekolah dan komunitas sekitar. Peta ini akan membantu dalam mengenali dan memikirkan lebih lanjut cara untuk mengatasi kesenjangan antara kerentanan dan kapasitas.

Buat sebuah Peta Sekolah dan tandai baik kerentanan maupun sumber daya seperti berikut ini:

- Pintu masuk dan pintu keluar
- Daerah berbahaya (di) bangunan

- Tempat pendaftaran pengunjung
- Daerah berbahaya di bawah tanah (untuk masuk ke sekolah)
- Daerah berbahaya di atas kepala
- Tempat berkumpul darurat
- Lokasi material berbahaya
- Lokasi keran pipa gas
- Peralatan pemadam kebakaran
- Lokasi meteran listrik
- Area pertolongan pertama
- Lokasi keran air
- Gerbang Permintaan dan Penyatuan Kembali
- Rute evakuasi dari bangunan (reunifikasi)
- Perlengkapan/ perbekalan untuk respon
- Orang-orang dengan disabilitas dan anak (yang tersimpan di lingkungan sekolah) usia dini

Mengurangi risiko

Evakuasi dipahami sebagai proses menyelamatkan diri atau kelompok secara mandiri ke daerah atau titik aman dengan selamat dan tepat waktu. Untuk memungkinkan evakuasi berjalan sebagaimana diharapkan, maka diperlukan rencana yang baik.

Peringatan dini adalah informasi yang perlu disebarluaskan dengan segera, sesaat sebelum bahaya datang, agar seluruh warga dapat menyelamatkan diri ke tempat aman, sesuai dengan rencana evakuasinya. Informasi ini bisa didapat langsung dari tanda-tanda alam, misalnya berupa getaran gempa yang dirasakan di lingkungan sekolah.

Tujuan pengembangan Sistem Peringatan Dini Sekolah adalah memberdayakan individu dan komunitas sekolah yang terancam bahaya, agar dapat bertindak tepat waktu dan tepat cara untuk menghindari kemungkinan terjadinya korban jiwa rusaknya harta benda dan lingkungan.

Syarat Sistem Peringatan Dini:

1. Ada informasi resmi atau informasi yang dapat dipercaya
2. Ada alat dan tanda bahaya yang disepakati sekolah
3. Ada cara untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada seluruh warga sekolah

Mengurangi Risiko Struktural

Tanggung jawab untuk menjaga keamanan struktural terletak pada pengelola sekolah dan juga staf bagian fasilitas dan pemeliharaan. Periksa untuk memastikan bahwa:

- Kolom atau balok tidak dirusak dengan memotong, mengekspos, atau membolonginya.
- Tidak membiarkan besi beton penguat terpapar udara atau oleh kelembaban.
- Tutup besi beton dengan adukan beton.
- Kayu yang lapuk, adukan yang retak, batu bata yang retak dan beton yang rusak sudah diperbaiki.
- Selokan dan sistem drainase terbebas dari puing-puing maupun kotoran lain.
- Air dan kelembaban tidak mengganggu kekuatan bangunan dengan cara membuat saluran yang baik.
- Atap terpasang kencang terhadap bangunan.
- Kaca yang pecah sudah diganti.

Mengurangi Risiko Non-Struktural

Keamanan Non-Struktural adalah mengatasi bahaya yang ditimbulkan oleh perabot dan peralatan bangunan, serta elemen bangunan seperti atap, jendela, tangga, alat pendingin udara, penyimpanan air, perpipaan, jalur keluar. Termasuk juga keamanan terhadap kebakaran.

Langkah-langkah keamanan non-struktural adalah hal-hal yang tidak terkait dengan sistem menahan-beban bangunan, dan merupakan hal-hal yang tergantung dari para pengguna bangunan. Termasuk di antaranya adalah pencegahan

kebakaran dan tersedianya peralatan pencegah kebakaran. Perhatian khusus diperlukan untuk memastikan bahwa semua penghuni bangunan dapat dengan selamat keluar dari bangunan saat terjadi tindakan evakuasi. Untuk gempa dan badai, yang menjadi pertimbangan utama adalah pencegahan terjadinya cedera baik saat masih berada di dalam bangunan atau saat sesudah berada di luar bangunan.

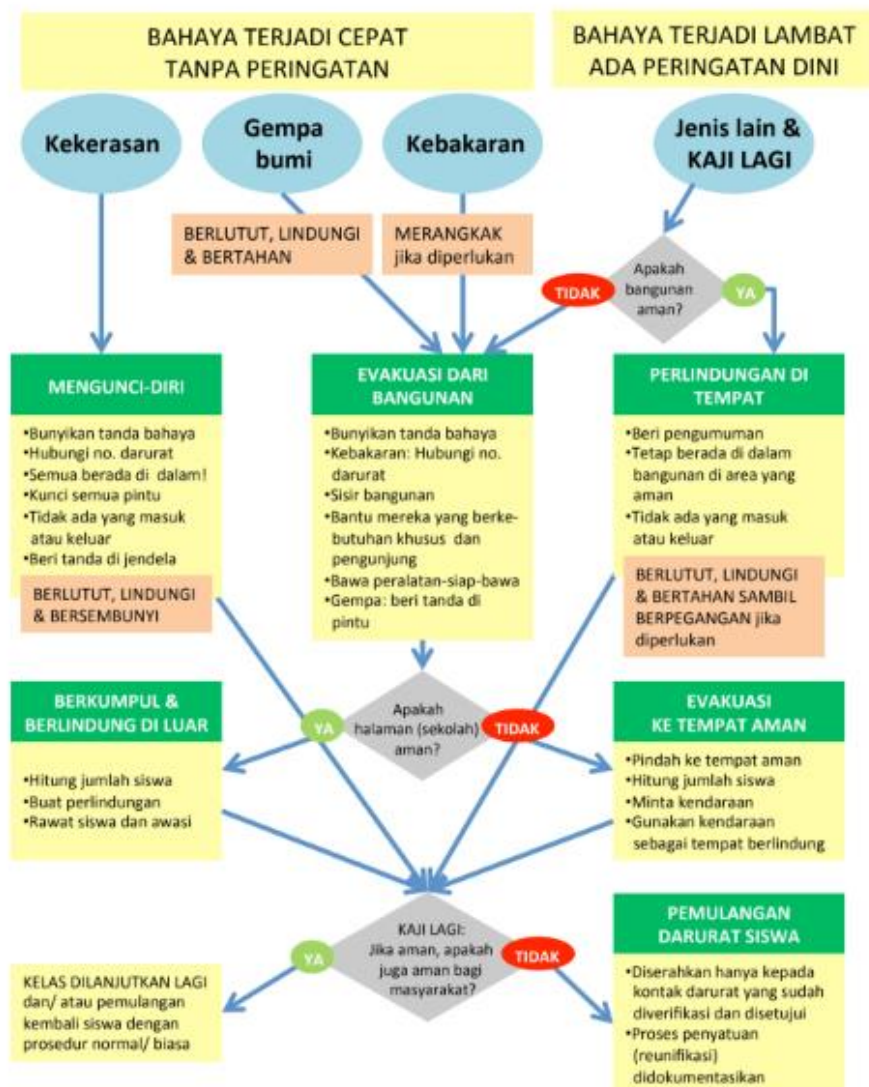
Keterampilan Merespon (SOP, Rencana Kontinjensi, simulasi) dan Penyediaan Perlengkapan Kebencanaan

Prosedur Operasional Standar

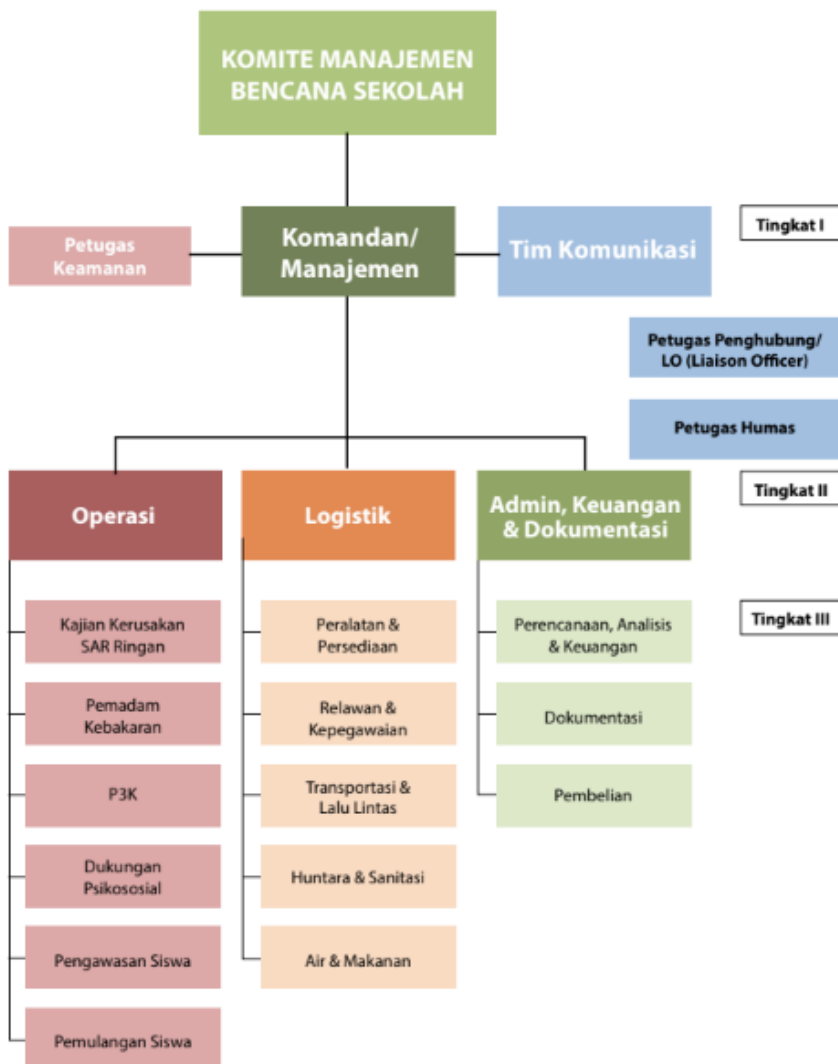
Prosedur standar bagi tanggap darurat tergantung dari jenis bahaya, dan harus disesuaikan dengan kondisi unik lingkungan Anda. Prosedur ini disusun berdasarkan enam prosedur dasar kedaruratan seperti berikut ini:

- Evakuasi (dari) bangunan/ gedung
- Perlindungan-di-tempat
- Mengunci-diri
- Berkumpul dan Berindung di Luar
- Evakuasi ke Tempat Aman
- Proses Aman Penyatuan Kembali (Reunifikasi) Keluarga

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONDISI DARURAT



STRUKTUR SISTEM KOMANDO KEJADIAN



Berikut adalah matriks uraian tahapan, parameter, indikator, dan verifikasi ketercapaian pilar manajemen bencana di sekolah.

TAHAP		PARAMETER	INDIKATOR	VERIFIKASI
Persiapan	Pembentukan Komite	Kebijakan sekolah	Terbentuknya Komite Manajemen Bencana Sekolah	SK Kepala Sekolah mengenai komite manajemen bencana sekolah
	Penyusunan kebijakan	Kebijakan sekolah	Adanya kebijakan, kesepakatan dan/atau peraturan sekolah yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana di sekolah.	Dokumen (termasuk di dalamnya Visi, Misi dan Tujuan Sekolah) yang memuat dan/atau mendukung upaya pengurangan risiko bencana di sekolah.
Perencanaan	Kajian Risiko	Sikap dan tindakan	Tersedianya pengetahuan mengenai Bahaya (jenis bahaya, sumber bahaya dan besaran bahaya); Kerentanan; Kapasitas; Risiko dan Sejarah Bencana yang terjadi di lingkungan sekolah atau daerahnya.	Struktur dan Muatan Kurikulum serta Silabus dan RPP dari Standar Kompetensi memuat pengetahuan mengenai Bahaya (jenis, sumber dan besaran); Kerentanan; Kapasitas; Risiko dan Sejarah yang terjadi di lingkungan sekolah atau daerahnya.
		Perencanaan kesiapsiagaan	Tersedianya dokumen penilaian risiko bencana yang disusun bersama secara partisipatif dengan warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah.	Kegiatan sekolah bagi peserta didik untuk mengobservasi Bahaya (jenis, sumber dan besaran); Kerentanan; Kapasitas dan Risiko yang ada di lingkungan sekolah, termasuk yang bersumber pada lokasi dan infrastruktur sekolah.
	Mengurangi risiko	Sikap dan tindakan	Tersedianya pengetahuan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di sekolah.	Dokumen penilaian risiko bencana yang disusun secara berkala sesuai dengan kerentanan sekolah.
				Struktur dan Muatan Kurikulum (pada Dokumen I KTSP) serta Silabus dan RPP dari SKKD (pada dokumen II KTSP) yang memuat pengetahuan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di sekolah.
				Kegiatan sekolah untuk mengidentifikasi upaya yang bisa mengurangi risiko bencana termasuk di dalamnya pilihan tindakan untuk melakukan relokasi sekolah atau retrofit gedung dan infrastruktur sekolah jika diperlukan.

TAHAP	PARAMETER	INDIKATOR	VERIFIKASI
Perencanaan	Mengurangi risiko	Tersedianya Sistem Peringatan Dini yang dipahami oleh seluruh komponen sekolah, meliputi: - Akses terhadap informasi bahaya, baik dari tanda alam, informasi dari lingkungan, dan dari pihak berwenang (pemerintah daerah dan BMKG) - Alat Peringatan serta biaya pemeliharannya dan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami seluruh komponen sekolah - PROTAP penyebaran informasi peringatan bahaya di lingkungan sekolah - Petugas yang bertanggungjawab dan berwenang mengoperasikan alat peringatan dini	Protap mengenai pelaksanaan sistem peringatan dini yang telah diuji dan diperbaharui melalui kegiatan simulasi/drill yang dilaksanakan secara berkala oleh sekolah.
	Keterampilan merespon	Sikap dan tindakan Keterampilan seluruh komponen sekolah dalam menjalankan rencana tanggap darurat Terlaksananya kegiatan simulasi <i>drill</i> secara berkala di sekolah dengan melibatkan masyarakat sekitar. Perencanaan kesiapsiagaan Tersedianya rencana aksi sekolah dalam penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana). Adanya peta evakuasi sekolah, dengan tanda dan rambu yang terpasang, yang mudah dipahami oleh seluruh komponen sekolah Kesepakatan dan ketersediaan lokasi evakuasi/ huntera terdekat dengan sekolah, disosialisasikan kepada seluruh komponen sekolah dan orangtua murid, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Adanya prosedur tetap kesiapsiagaan sekolah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah, di antaranya meliputi/contohnya: - Penggunaan dan penyimpanan dokumen penting sekolah pada tempat yang aman. - Pencatatan nomor telepon penting yang mudah diakses seluruh komponen sekolah (a.l. Puskesmas/ rumah sakit terdekat, pemadam kebakaran, dan aparat terkait). Adanya gugus siaga bencana sekolah yang melibatkan perwakilan peserta didik. Adanya kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota/kabupaten dengan pihak-pihak terkait setempat (seperti perangkat desa/kelurahan, kecamatan, BPBD, dan lembaga pemerintahan lain yang ada).	Komponen sekolah untuk menjalankan rencana tanggap darurat pada saat simulasi. Frekuensi pelaksanaan latihan/ simulasi dalam 1 tahun. Dokumen rencana aksi sekolah yang dibuat secara berkala, direview dan diperbaharui secara partisipatif dan diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat. Sekolah memiliki peta evakuasi dengan tanda dan rambu yang terpasang yang mudah dipahami oleh seluruh komponen sekolah dan dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekolah. Sekolah memiliki lokasi evakuasi/ huntera terdekat yang tersosialisasikan serta disepakati oleh seluruh komponen sekolah, orangtua murid, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Protap kesiapsiagaan sekolah yang direview dan dimutakhirkan secara rutin dan partisipatif. Jumlah peserta didik yang terlibat dalam gugus siaga bencana sekolah. Jumlah kegiatan dan mitra kerjasama.

TAHAP	PARAMETER	INDIKATOR	VERIFIKASI	
Perencanaan	Penyediaan perlengkapan kebencanaan	Perencanaan kesiapsiagaan	Jumlah dan jenis perlengkapan, suplai dan kebutuhan dasar pasca bencana yang dimiliki sekolah.	Adanya perlengkapan dasar dan suplai kebutuhan dasar pasca bencana yang dapat segera dipenuhi dan diakses oleh warga sekolah, seperti: alat PP dan evaluasi, terpal, tenda dan sumber air bersih.
	Rencana Kesiambungan Pendidikan	Perencanaan kesiapsiagaan	Dimilikinya rencana kontinjensi operasional sekolah di masa darurat yang telah mempertimbangkan faktor: 1. Penyandang disabilitas 2. Jarak dan akses transportasi 3. Keamanan pribadi peserta didik dan guru 4. Relokasi 5. Alternatif lokasi dan fasilitas pembelajaran sementara 6. Jadwal dan cara pengajaran alternatif 7. Kemungkinan sekolah dijadikan tempat pengungsian	Rencana kontinjensi operasional sekolah di masa darurat yang ditelaah dan diperbaharui serta diketahui oleh perangkat sekolah (manajemen sekolah, guru, peserta didik)
Keberlanjutan	Pemantauan	Mobilisasi sumberdaya	Pemantauan dan evaluasi partisipatif mengenai kesiapsiagaan dan keamanan sekolah secara rutin (menguji atau melatih kesiapsiagaan sekolah secara berkala).	Sekolah memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi kesiapsiagaan dan keamanan sekolah partisipatif secara rutin.
	Pengkinian	Mobilisasi sumberdaya	Dokumen SOP dan/atau rencana kontinjensi diperbaharui secara berkala	Dokumen SOP dan/atau rencana kontinjensi yang sudah diperbaharui

PILAR 3 - PENDIDIKAN PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

TAHAP PELAKSANAAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN

Tahap pelaksanaan dalam Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana terdiri dari tiga tahap yaitu:

PELATIHAN GURU DAN PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN LAIN

Tahapan pelatihan guru dan pengembangan tenaga kependidikan lain adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi tingkat kemampuan dan pengetahuan dari guru dan tenaga kependidikan tentang sekolah aman dan kemampuan untuk merespon situasi bencana;
2. Pelaksanaan pelatihan guru dan tenaga kependidikan berbasis hasil evaluasi;
3. Peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan melalui keikutsertaan dalam seminar, acara-acara berbasis komunitas, dan sosialisasi kepada siswa.

PENDIDIKAN BENCANA

Untuk memulai pendidikan siaga bencana di sekolah, idealnya setiap sekolah melakukan serangkaian proses kegiatan sebagai berikut:

1. Mengikuti pelatihan atau pembekalan tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;
2. Mengenali risiko bencana di sekitar lokasi sekolah;
3. Merencanakan integrasi kurikulum ke dalam Rencana Belajar Tahunan, Bulanan, Mingguan dan Harian dan pemantauan hasil belajar dengan cara:

- a) Mengintegrasikan materi PRB ke dalam bahan belajar;
 - b) Mengintegrasikan materi PRB ke dalam mata pelajaran pokok dan muatan lokal;
 - c) Mengintegrasikan materi PRB ke dalam program pengembangan diri.
4. Menyelenggarakan mata pelajaran Pendidikan PRB.
 5. Memadukan pendidikan kesiapsiagaan bencana ke dalam kebijakan sekolah.

EKSTRAKURIKULER DAN PENDIDIKAN INFORMAL BERBASIS-MASYARAKAT

Secara khusus kegiatan ekstrakurikuler bertujuan:

1. Menyediakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan potensi, bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga mereka mampu mewujudkan jati dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat;
2. Memandu (mengidentifikasi dan membina) dan memupuk (mengembangkan dan meningkatkan) potensi-potensi peserta didik secara utuh;
3. Pengembangan aspek afektif (nilai moral dan sosial) dan psikomotor (keterampilan) untuk menyeimbangkan aspek kognitif peserta didik. Membantu peserta didik dalam pengembangan minatnya, juga membantu peserta didik agar mempunyai semangat untuk lebih giat belajar serta menanamkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang manusia yang mandiri (karena dilakukan di luar jam pelajaran).

Berdasarkan berbagai indikator di atas mulai dari tahap persiapan sampai dengan advokasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TAHAP	PILAR	PARAMETER	INDIKATOR	VERIFIKASI
Persiapan	Analisa sektor pendidikan		Tersedianya dokumen analisa sektor pendidikan yang diperbaharui setiap 2 tahun	Dokumen analisa sektor pendidikan
	Kajian dan perencanaan berpusat pada anak		Tersedianya peta risiko sederhana tingkat sekolah dan dokumen kajian risiko multi ancaman tingkat sekolah	Peta risiko sederhana tingkat sekolah dan dokumen kajian risiko multi ancaman tingkat sekolah
			Tersedianya dokumen kajian dan perencanaan berpusat pada anak di tingkat sekolah	Dokumen kajian dan perencanaan berpusat pada anak di tingkat sekolah
Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan	Pelatihan guru dan pengembangan staf	Sikap dan Tindakan	Terlaksananya pelatihan pengintegrasian PRB ke dalam KTSP	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan sekolah
		Kebijakan Sekolah	Adanya kebijakan, kesepakatan dan/ atau peraturan sekolah yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana di sekolah	
		Perencanaan Kesiapsiagaan	Tersedianya dokumen penilaian risiko bencana yang disusun bersama secara partisipatif dengan warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah.	
		Mobilisasi sumberdaya	Adanya kerjasama antara dewan guru sekolah dengan asosiasi profesi guru lainnya di wilayahnya seperti forum MGMP terkait upaya PRB di sekolah	Frekuensi dan jenis kegiatan kerjasama di antara dewan, guru dan asosiasi profesi guru lainnya terkait upaya PRB di sekolah

TAHAP	PILAR	PARAMETER	INDIKATOR	VERIFIKASI
Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan	Pendidikan bencana	Sikap dan Tindakan	Terlaksananya sosialisasi mengenai pengetahuan PRB, Sekolah Siaga Bencana dan kesiapsiagaan kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah	Jumlah sosialisasi rutin dan berkelanjutan di sekolah
		Kebijakan sekolah	Tersedianya akses bagi seluruh komponen sekolah terhadap informasi, pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal PRB (materi acuan, ikut serta dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa, jamboree murid, dsb.)	Media informasi sekolah (contoh: majalah dinding, perpustakaan, buku, modul) yang memuat pengetahuan dan informasi PRB dan dapat diakses oleh warga sekolah. Jumlah kesempatan dan keikutsertaan warga sekolah dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa, jamboree murid, dll.
		Pengetahuan dan sikap terhadap bencana	Tersedianya pelatihan dan upaya peningkatan pengetahuan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.	
			Terlaksananya pengintegrasian pelatihan PRB ke dalam kurikulum sekolah (materi pembelajaran, muatan lokal, ekstrakurikuler)	
			Adanya kegiatan simulasi bencana secara reguler	
			Keterampilan seluruh komponen sekolah dalam menjalankan rencana pengurangan risiko dan tanggap darurat	
		Ekstrakurikuler dan pendidikan informal berbasis-masyarakat	- Analisis sumber daya dalam kegiatan ekstrakurikuler - Identifikasi kebutuhan, potensi dan minat peserta didik - Menetapkan bentuk kegiatan - Mengupayakan sumber daya sesuai pilihan peserta didik - Menyusun program ekstrakurikuler	

TAHAP	PILAR	PARAMETER	INDIKATOR	VERIFIKASI
Advokasi	Terintegrasi ke dalam kurikulum		• Pendidikan pencegahan yaitu upaya preventif agar kerusakan dan korban dapat dikurangi jika terjadi bencana • Pendidikan tanggap darurat yaitu upaya pencarian, penyelamatan, dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat (sandang, pangan, obat-obatan, perlindungan dll.) • Pendidikan rehabilitasi yaitu perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan dan mengembalikan harkat hidup korban bencana • Pendidikan rekonstruksi yaitu pembangunan kembali prasarana/sarana serta fasilitasi umum yang rusak agar kehidupan normal kembali	
	Pesan kunci berdasarkan konsensus		• Jumlah guru yang memahami pesan kunci terkait kebencanaan • Tersedianya informasi pesan kunci bencana di areal sekolah • Tersosialisasinya pesan kunci terkait kebencanaan kepada peserta didik	

